

PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS SMART VILLAGE

Oleh :

Irfan Nursetiawan

irfan.nursetiawan@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Era industri 4.0 dan civil society 5.0 telah mengubah paradigma masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang tidak hanya menginginkan inovasi dalam pembangunan perdesaan berkelanjutan, tetapi dalam bentuk pelayanan administrasi maupun non-administrasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa menginginkan pelayanan yang prima. Paradigma masyarakat yang ingin serba tepat waktu dan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik merupakan keinginan, serta harapan dari masyarakat. Sehingga diperlukan langkah solutif dari Pemerintahan Desa, salah satunya penerapan konsep smart village yang berdasarkan pada Total Quality Service (TQS) dan tetap terfokus pada kepuasan pelayanan bagi pelanggan (masyarakat desa). Metode yang digunakan, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokus penelitian di beberapa desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Penerapan konsep smart village telah dilakukan di beberapa desa di wilayah Kabupaten Ciamis yang berorientasi pada penyampaian informasi desa dan membantu dalam pelayanan terhadap masyarakat. Hasil yang dicapai cukup baik, namun memerlukan perbaikan dalam sistem informasi manajemen yang diterapkan.

Kata Kunci : Smart Village, Total Quality Service, Sistem Informasi Manajemen.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi-inovasi yang tentunya sangat mendukung kehidupan manusia. *Prototype*, model bahkan sistem yang ada tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi untuk mendukung sebuah peradaban manusia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan tidak terlepas dari pemberian pelayanan oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat perdesaan. Paradigma masyarakat perdesaan yang menginginkan bentuk pelayanan yang efektif dan efisien mengharuskan

Pemerintahan Desa menerapkan konsep yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan dalam hal kebutuhan administrasi. Kabupaten Ciamis sebagai salah satu kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat mempunyai potensi ekonomi yang beragam dan karakteristik masyarakat yang tentunya *pluralis*. Fokus utama Pemerintah Daerah tentunya harus terfokus pada pemenuhan masyarakat. Inilah yang menjadi landasan dalam penelitian yang dilakukan.

Desa dalam konteks pelayanan mempunyai peran dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan, baik dari segi administrasi

maupun non-administrasi. Hal tersebut termasuk ke dalam fungsi dan tujuan dari penataan pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat (3) menyatakan, penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Dengan demikian, desa mempunyai fungsi dalam hal mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu desa di Kabupaten Ciamis yang mengkolaborasi antara pemanfaatan teknologi informasi, yakni Desa Karangkamulyan. Desa tersebut telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakatnya.

Konsep pemanfaatan teknologi informasi tersebut, mendekati konsep *smart village*. Menurut Herdiana, Dian (2019) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen pokok *smart village*, yakni *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Ketiga elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan *smart village* berupa "*smart relationship*" yakni keterjalinan konstruktif yang muncul dari relasi ketiga elemen *smart village* tersebut. Dengan demikian, sinergisitas yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, tetapi yang menjadi pembeda yakni dalam substansi yang berorientasi pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan *Toyol Quality Service* (TQS) yang menjadi pendorong dan mendukung penerapan dari *smart village*.

Daya kritis masyarakat yang semakin tinggi dan keinginan yang beragam, serta tuntutan pembangunan yang berkelanjutan harus direalisasikan menjadi tantangan bagi Pemerintahan Desa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kemajuan global juga mengharuskan kita sebagai, *civil society* untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi bukan untuk "ditakuti", namun harus dimanfaatkan, khususnya untuk peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan bukan hanya tertuju pada hasil, tetapi harus melihat proses dalam pembentukan *output* sebagai hasil dari *input* dan *process* dari sistem yang diimplementasikan.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bagian dari konsep sistem informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan suatu kebijakan yang relevansinya terhadap kemajuan suatu organisasi, lembaga yang bersifat publik maupun privat (swasta). Sistem Informasi Manajemen (SIM) tidak terlepas dari komputasi.

Menurut Awani, M.F. (2004) menyatakan Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma.

Salah satu wujud dari pemanfaatan teknologi informasi, yakni dengan pemanfaat website sebagai media informasi

dan dapat pula dijadikan sebagai media untuk membantu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perdesaan. Inilah momentum dalam adaptasi ke revolusi industri 4.0.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemerintahan Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai keunikan, baik sosial masyarakatnya maupun hierarki pemerintahannya. Desa juga dapat dikatakan sebagai masa depan dari miniatur demokrasi di Indonesia dalam segi politik dan desa dapat menjadi penggerak ekonomi yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal setempat.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) tentunya harus diimbangi dengan kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan potensi tersebut. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arifin, M. Z (2018) menyatakan, bahwa Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir dari kegiatan/program-program desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik yang belum, sedang dan akan dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2) menyatakan Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran penting Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu wujud keberhasilan dari Pemerintah Desa dalam menjadikan potensi desanya sebagai potensi ekonomi yang berkelanjutan. Kebutuhan akan informasi bagi masyarakat akan menumbuhkan budaya literasi yang menjunjung tinggi peningkatan kompetensi masyarakat desa.

Salah satu bentuk dari pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni dalam pemberian pelayanan mengenai administrasi, seperti surat. Menurut Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015) menyatakan, terdapat 12 (dua belas) jenis surat, diantaranya:

- a. Surat Keterangan Lahir;
- b. Surat Keterangan Menikah;
- c. Surat Pengantar SKCK;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Pengantar;
- f. Surat Keterangan Wali;
- g. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
- h. Surat Keterangan Janda/Duda;
- i. Surat Keterangan Tidak Mampu;
- j. Permohonan KTP WNI;
- k. Permohonan KK Baru WNI; dan
- l. Surat Permohonan Akta Kelahiran.

Hal tersebut merupakan salah satu pelayanan yang harus dipenuhi oleh

Pemerintah Desa, sebagai pelaksana tugas dalam pemberian layanan bagi masyarakat. Hierarki birokrasi untuk mendapatkan pelayanan tentunya tidak menghambat dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap informasi dalam mendapatkan pelayanan administrasi dan non-administrasi. Peran serta Pemerintah Desa sangat diperlukan untuk merealisasikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa.

Konsep birokrasi yang pro terhadap masyarakat dapat menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap Pemerintah Desa. Menurut Suwarno, J. (2012) menyatakan, Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

Inilah yang harus menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Semua sumber daya yang ada di desa, tentunya menjadi modal yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

2. Konsep *Smart Village*

Smart Village merupakan salah satu konsep yang berasal dari *Smart City*. Konsep tersebut merupakan salah satu konsep yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa.

Ada beberapa konstruksi dari pembentuk *Smart Village*. Menurut Herdiana, Dian (2019), menyatakan dimensi sumber daya, institusi dan teknologi menjadi dimensi yang mendasar bagi terlaksananya *Smart Village*,

sedangkan layanan digital, rantai layanan dan keberlanjutan menjadi dimensi pembeda yang diungkap oleh para ahli tersebut. Kesamaan pemahaman tersebut didasarkan kepada pemahaman bahwa dalam penerapan teknologi informasi dibutuhkan adanya kapabilitas dari institusi sebagai pemegang otoritas dan dukungan kapasitas sumber daya.

Adapun menurut Srinadi, N. L. P., & Puspita, N. N. H. (2018) menyatakan, Kerangka kerja dalam implementasi teknologi informasi dalam *Smart Village*, sebagai berikut:



Gambar. 1 Kerangka Kerja Analisis Kebutuhan Fungsional

Sumber: Srinadi, N. L. P., & Puspita, N. N. H. (2018).

Konsep *Smart Village* yang berorientasi pada pelayanan, maka mengharuskan pelayanan kepada masyarakat desa bukan hanya berupa informasi satu arah, tetapi dapat pula informasi dua arah yang mengarah pada hubungan timbal balik (*feed back*) antara masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa dan sebaliknya.

Konsepsi dasar dalam penerapan dari *Smart Village*, yakni berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi dalam

penyusunan, serta penentuan kebijakan yang akan diimplementasikan. Salah satu model yang berkembang dan banyak diadopsi dari perkembangan teknologi informasi, yakni *e-government*.

Menurut Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010) menyatakan, *Electronic government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.

Inilah yang menjadi kajian utama dalam penelitian yang dilakukan dan berkaitan dengan konsep *Smart Village* yang dituangkan dalam media website desa. Informasi desa dan pelayanan untuk masyarakat desa dapat diakses secara bebas, sehingga ini menjadi bagian dari transparansi desa terhadap masyarakatnya.

Hal tersebut dapat menjadi acuan percepatan pembangunan desa. Menurut Adisasmita (dalam Hermayanti, E. S., & Yuwono, T., 2020) menyatakan, pengelompokan pembangunan desa terdiri dari:

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.
- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber- sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat

efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

- c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber- sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Tetapi dalam hal aksesibilitas, bukan hanya terfokus pada pembangunan jalan, namun harus dibangun juga akses jaringan telekomunikasi, salah satunya jaringan internet. Internet menjadi kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Menurut Sofiyudin dan Nugroho (dalam Cerdas, D., 2018) menyatakan implementasi *Cyber Village* dan *Smart Village* menjadi salah satu langkah yang solutif dalam melakukan percepatan melek teknologi dan informasi berbasis internet. Sehingga dalam penerapan *Smart Village* mengharuskan adanya jaringan internet. Literasi digital dapat memacu motivasi masyarakat untuk mengenal lebih dekat berkaitan dengan sumber informasi lain yang tentunya konstruktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Sistem Informasi Manajemen

Peningkatan pengguna internet dan kebutuhan akan informasi mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan teknologi informasi. Salah satu sistem yang dipakai dalam penentuan kebijakan, yakni Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Menurut Widjayanto (dalam Nugraha, H. A., & Astuti, Y. W., 2013) menyatakan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis.

Dengan demikian sistem informasi manajemen bertumpu pada kualitas *input*, *process*, dan *output* yang akan menentukan kualitas informasi yang disajikan. *Feed back* yang dapat dihasilkan yakni berkaitan dengan keputusan kebijakan yang berdasarkan data yang telah diolah. Basis data merupakan sumber data primer yang dapat menjadi acuan untuk keputusan kebijakan yang akan diambil oleh seorang manajer atau pemimpin tertinggi suatu lembaga, khususnya di sektor publik. Sehingga SIM bagian dari manajemen seorang manajer.

4. *Total Quality Service*

Sektor publik tidak terlepas dari pelayanan sebagai bagian dari tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan. Menurut Holle, E. S. (2011) menyatakan, hakekat pelayanan publik antara lain:

- a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik.
- b. Mendorong upaya mengaktifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Peningkatan produktivitas kerja yang berorientasi pada kinerja merupakan harapan dari semua *leader* dalam sebuah organisasi maupun lembaga publik demi tercapainya kualitas pelayanan yang baik.

Efektivitas sistem merupakan bagian dari peningkatan efisiensi waktu dalam pemberian pelayanan dan memangkas birokrasi yang berbelit, khususnya dalam hal pelayanan publik bagi masyarakat.

Pelayanan sektor publik pada saat ini telah berorientasi pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada penggunaan layanan (masyarakat). Salah satu konsep yang banyak diimplementasikan, yakni *Total Quality Service* (TQS). Menurut Fandy Tjiptono (dalam Aziz, S., 2012) menyatakan, bahwayakni *Total Quality Service* (TQS), kualitas dipandang secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang diperhatikan, melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah proses, lingkungan dan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, manusia merupakan faktor sumber daya yang dapat ditingkatkan secara kompetensi. Lingkungan sebagai faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga proses menjadi salah satu bagian dalam meningkatkan kinerja. Kualitas kinerja akan menentukan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2018:9), menjelaskan, bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun lokus penelitian dalam hal ini di Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan fokus pada website desa tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah mengimplementasikan pelayanan bagi masyarakat yang berbasis website. Peta website yang ditampilkan berupa Beranda, Profil Desa, Pemdes, LKD, Potensi Desa, Kontak, Informasi Publik Desa, dan Login. Hal tersebut dapat diakses di www.karangkamulyan.com.

Di website tersebut terdapat banyak informasi seputar desa yang dapat diakses bebas oleh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk literasi dan edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh berkaitan dengan program dan kinerja dari Pemerintah Desa itu sendiri.

Selain itu, terdapat tampilan website yang menampilkan beberapa data statistik dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar.2 Icon Statistik Website Desa
Sumber: <https://karangkamulyan.com>, 2020.

Berdasarkan hal tersebut, maka website tersebut telah menampilkan data dan informasi bagi masyarakat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah terpenuhi. Selain itu, terdapat aspek pelayanan publik yang berbasis website. Hal ini dapat dilihat, terdapat pelayanan mandiri yang dikhususkan bagi masyarakat

Desa Karangkamulyan untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan secara daring. Berikut tampilan menu bar untuk pelayanan mandiri bagi masyarakat, yaitu:



Gambar. 3 Layanan Mandiri
Sumber: <https://.karangkamulyan.com>, 2020.

Berdasarkan hal tersebut, maka Desa Karangkamulyan telah menerapkan prinsip *Smart Village* dalam bidang pelayanan administrasi. Hal tersebut juga mengacu pada Sistem Informasi Manajemen (SIM), yakni terdapat *input* berupa data masyarakat yang dimasukan, *process* berupa layanan administrasi yang diberikan dan *output* hasil akhir dari pelayanan administrasi, seperti surat keterangan.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan Pemerintahan Desa dapat membantu masyarakat dan tentunya akuntabilitas, serta transparansi telah dilakukan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, website tersebut telah terintegrasi dengan lembaga atau dinas yang bernaung di lembaga pemerintahan.

Namun, masih terdapat kekurangan yakni dalam hal ketika membuka website desa tersebut terlihat berat ketika jaringan internet *low*. Selain itu, dapat pula diberikan inovasi dengan pengembangan ke arah aplikasi yang tentunya *mobile friendly*. Hal tersebut untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat diberikan pelayanan secara prima. Kualitas layanan yang dihasilkan dengan adanya

penerapan konsep *smart village*, yakni cukup baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan kualitas layanan, baik secara administrasi maupun non-administrasi bagi masyarakat di Desa Karangkamulyan.
- b. Hambatan dalam implementasi konsep *smart village*, yakni pada jaringan internet.
- c. Solusi yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Karangkamulyan dapat dilakukan secara *offline* dan ditangani langsung oleh perangkat desa.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar dapat memperluas jaringan internet, karena diperlukan aksesibilitas yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet.
- b. Bagi Pemerintah Desa Karangkamulyan dapat mengintegrasikan website tersebut ke dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. Z (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal*

Thengkyang, <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman>, 20(20), 1-21.

Awani, M.F. (2004) Sistem Informasi Manajemen. Tersedia (Online): <https://researchgate.net> [10 April 2020].

Aziz, S. (2012). Total Quality Service (TQS) sebuah alternatif peningkatan kualitas layanan perpustakaan perguruan tinggi. *AL-MAKTABAH*, 11(1).

Cerdas, D. (2018). Model Smart Village Berbasis Teknologi Informasi. *Kata Pengantar*, 1(1), 1.

Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9-21.

Herdiana, Dian (2019).

Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. IPTEK-KOM.21.(1).

Hermayanti, E. S., & Yuwono, T. (2020). Implementasi Green Smart Village di Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 121-130.

Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015). Sistem pelayanan administrasi kependudukan desa candigatak berbasis web. *IT CIDA*, 1(1).

Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government; Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam

- Meningkatkan Public Service. *Jurnal Sasi*, 17(3).
- Nugraha, H. A., & Astuti, Y. W. (2013). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 25-33.
- Srinadi, N. L. P., & Puspita, N. N. H. (2018). Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem Administrasi Sebagai Pendukung Implementasi *Smart Village*. SENTIKA.9-14.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, J. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2).
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.